

## HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

Mohammad Abdul Karim  
[akukarimm5@gmail.com](mailto:akukarimm5@gmail.com)  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

### ABSTRAK

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua sisi yang saling berkaitan dalam kehidupan bernegara, terutama dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan konstitusional bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam konsep hak dan kewajiban warga negara, hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan teoretis dan analisis berbasis literatur, dokumen ini juga akan membahas tantangan dan solusi dalam mewujudkan harmoni antara hak dan kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran kolektif akan peran warga negara dalam demokrasi.

**Kata Kunci:** Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai-Nilai Pancasila.

### PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, hubungan antara negara dan warga negara didasarkan pada prinsip timbal balik, di mana negara memberikan hak kepada warga negaranya, dan sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk mendukung keberlangsungan negara. Hak warga negara meliputi hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban warga negara mencakup taat pada hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan hak dan kewajiban ini. Namun, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban, yang dapat menghambat harmoni sosial dan pembangunan nasional (Nauli, Z., Elviana, E., & Nelwati, S., 2024).

Tantangan utama dalam mewujudkan keseimbangan ini adalah kurangnya kesadaran warga negara terhadap tanggung jawab mereka, yang sering kali lebih fokus pada menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa dinamika baru dalam pelaksanaan demokrasi, yang menuntut etika yang lebih kuat dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara (Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M., 2021). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu mengharmonikan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik hak dan kewajiban warga negara. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep teoritis dari referensi yang telah disebutkan, seperti karya Nauli et al. (2024), Zahra & Nelwati (2024), dan Prasetyo et al. (2023). Pendekatan ini

memungkinkan penulis untuk menguraikan secara mendalam hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, analisis kritis dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Nurhaifa Idris, N., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hak Warga Negara dalam Konteks Demokrasi**

Hak warga negara dalam demokrasi mencakup berbagai aspek, mulai dari hak politik, hak sosial, hingga hak budaya. Hak politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan negara. Hak sosial, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, menjamin kesejahteraan warga negara, sementara hak budaya memungkinkan individu untuk mempertahankan identitas budayanya dalam kerangka kebhinekaan. Namun, pelaksanaan hak-hak ini sering kali menghadapi tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Nauli, Z., Elviana, E., & Nelwati, S., 2024).

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara dijamin oleh UUD 1945, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, meskipun Pasal 31 menjamin hak atas pendidikan, masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak warga negaranya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa hak-hak ini dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali (Prasetyo, D., Danurahman, J., & Hermawan, H., 2023).

### **B. Kewajiban Warga Negara dalam Konteks Demokrasi**

Kewajiban warga negara merupakan bagian integral dari kontrak sosial antara individu dan negara. Dalam sistem demokrasi, kewajiban ini mencakup partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti mengikuti pemilu, menaati hukum, dan menjaga persatuan bangsa. Salah satu bentuk kewajiban yang paling penting adalah menjaga harmoni sosial melalui musyawarah mufakat, yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia. Musyawarah mufakat tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama (Zahra, M., & Nelwati, S., 2024).

Namun, pelaksanaan kewajiban ini sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran warga negara. Banyak warga negara yang lebih fokus pada menuntut hak mereka tanpa memahami bahwa kewajiban mereka, seperti membayar pajak atau menjaga lingkungan, merupakan prasyarat untuk keberlangsungan negara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini, karena melalui pendidikan, warga negara dapat memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban (Prasetyo, D., Danurahman, J., & Hermawan, H., 2023).

### **C. Tantangan dalam Harmonisasi Hak dan Kewajiban**

Tantangan utama dalam harmonisasi hak dan kewajiban warga negara adalah ketidakseimbangan antara kesadaran akan hak dan kewajiban. Banyak warga negara yang menuntut hak mereka, seperti hak atas kebebasan berpendapat, tanpa memahami kewajiban mereka untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Hal ini terutama terlihat di era digital, di mana penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif dapat memicu konflik sosial. Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya individualisme yang dapat melemahkan semangat kolektif dalam melaksanakan kewajiban (Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M., 2021).

Selain itu, keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia juga menjadi tantangan

dalam harmonisasi hak dan kewajiban. Meskipun keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, sering kali terjadi konflik akibat kurangnya toleransi dan pemahaman antar kelompok. Pendidikan agama, seperti pendidikan Islam, dapat menjadi sarana untuk menggali nilai-nilai toleransi dan moderasi yang mendukung harmoni sosial (Lubis, P., 2024). Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

#### **D. Solusi melalui Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Dalam Kurikulum Merdeka, pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mencakup pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan simulasi musyawarah mufakat, yang memungkinkan siswa untuk memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban (Fitroh, I., & Rosidi, M. I., 2024).

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus menekankan etika demokrasi, terutama dalam menyampaikan pendapat di era digital. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, warga negara perlu dilatih untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak memicu konflik. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi wadah untuk membangun etika ini, sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam demokrasi dengan cara yang konstruktif (Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M., 2021).

### **KESIMPULAN**

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam sistem demokrasi. Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah mufakat. Namun, pelaksanaan hak dan kewajiban ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran warga negara, ketimpangan akses terhadap hak, dan dampak globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan ini, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan etika demokrasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, harmoni antara hak dan kewajiban warga negara dapat tercapai, sehingga mendukung terwujudnya demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat (Nauli, Z., Elviana, E., & Nelwati, S., 2024).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nauli, Z., Elviana, E., & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180-193.
- Nurhaifa Idris, N. (2023). Bukti Pengajaran Kewarganegaraan Kelas MNJ.
- Zahra, M., & Nelwati, S. (2024). ANALISIS MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT SERTA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6).
- Fitroh, I., & Rosidi, M. I. (2024). Harmoni Nilai-Nilai Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 15(2), 246-254.
- Prasetyo, D., Danurahman, J., & Hermawan, H. (2023). Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara baik dan cerdas. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 8(1), 15-23.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.

Lubis, P. (2024). Harmoni Agama Melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi Dan Batasan-Batasan Moderasi Dalam Konteks Keberagaman. Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society, 1(1), 314-332.